



## PANDANGAN ULAMA WOYLA TERHADAP AYAT-AYAT KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

Ainal Marziah<sup>1</sup>, Hanif<sup>2</sup>, Triansyah Fisa<sup>3</sup>  
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh<sup>1,2,3</sup>

<sup>1</sup>[aainolmarziah@gmail.com](mailto:aainolmarziah@gmail.com) | <sup>2</sup>[hanifmdahlan@staindirundeng.ac.id](mailto:hanifmdahlan@staindirundeng.ac.id) | <sup>3</sup>[edukasi\\_fisa@outlook.co.id](mailto:edukasi_fisa@outlook.co.id)

---

### Abstrak

Anggapan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan terbelakang telah menjadi perbicangan dikalangan masyarakat, terutama dalam masyarakat woyla. Sehingga anggapan ini memunculkan persepsi bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin, seperti halnya ulama klasik yang cenderung tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin. Tetapi, mayoritas ulama kontemporer membolehkan kepemimpinan perempuan berdasarkan ayat yang sama menyatakan tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin. Hal inilah yang menjadi perlu adanya kajian lebih lanjut hingga didapatkan pemahaman yang terarah. Kajian ini berpusat pada ulama dayah yang berada di Woyla daerah kabupaten Aceh Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan ulama dayah woyla terhadap kepemimpinan Perempuan dan adakah ayat Al-Qur'an yang secara jelas menyebutkan tentang kepemimpinan perempuan. Berdasarkan hasil dari penelitian lapangan (*field research*) ini ditemukan bahwa mayoritas ulama dayah Woyla memandang Perempuan tidak boleh menjadi pemimpin karena ada beberapa alasan yang didasari dari surah an-Nisa' ayat 34. Namun ada perihail yang membolehkannya dalam ranah-ranah tertentu yaitu selain rumah tangga dan keluarga dengan berlandaskan ayat Al-Qur'an tentang kesetaraan manusia yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama yakni penolong bagi yang lainnya tanpa penyebutan gender (laki-laki/Perempuan).

### Abstract

The belief that women are weak and inferior has been a long-standing discussion in the Woyla community, leading to the perception that women are unfit for leadership, much like the classical scholars who largely prohibited women from leading. However, most contemporary scholars allow female leadership, interpreting the same Qur'anic verses differently. This study focuses on the views of dayah scholars in Woyla, Aceh Barat, aiming to explore their stance on female leadership and whether the Qur'an explicitly addresses this issue. Field research reveals that the majority of dayah scholars in Woyla hold that women should not be leaders, citing Surah An-Nisa, verse 34, as a basis for their argument. Nonetheless, they allow women to lead in specific areas outside of household and family matters, relying on Qur'anic verses that emphasize human equality and the mutual support of individuals without distinguishing between male and female. This nuanced understanding shows that while traditional views may restrict women's leadership in certain domains, there is space for female leadership in other contexts based on broader interpretations of equality in the Qur'an.

**Keywords:** Woyla Scholars, Leadership Verses, Women

---

### A. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama rahmatan lil-'alamin telah menempatkan setiap manusia berada pada posisi yang sederajat dan menjadikan setiap manusia sebagai pemimpin yang nantinya akan dimintai pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinya. (Kayo, 2005) Semua manusia memiliki kedudukan yang sama dihadapan Allah, (al-Hujurt: 13) hanya tempat kembalinya saja yang berbeda bergantung pada apa yang dikerjakan selama hidupnya. Al-Qur'an yang dijadikan sebagai pedoman hidup telah

mengajarkan kepada setiap manusia tentang nilai-nilai persamaan, keadilan dan kesetaraan umat manusia tanpa melihat perbedaaan antara satu sama lainnya, baik itu jenis kelamin, status sosial, ras, maupun agama. Tetapi, dimasa sekarang terjadi diskriminasi antara laki-laki dan Perempuan, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat (Umar, 2001).

Secara etimologi pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi serta membujuk orang lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dia menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok (Echols & Shadily, 1975, hlm. 351; Kbbi.web.id, 2021). Seorang yang menjadi pemimpin harus seorang yang memiliki kelebihan yang lebih daripada rata-rata anggota Masyarakat lainnya, sehingga ia mampu membimbing yang lain (Shihab, 2000, hlm. 482).

Dalam Islam pemimpin yang dianjurkan adalah kaum (laki-laki) karena sikapnya yang cenderung lebih tegas dan bertanggung jawab. Al-Mawardi menyebutkan dalam Kitabnya *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, bahwa syarat seorang pemimpin mempunyai tujuh syarat, yaitu: Adil, berilmu, normal panca indera mendengar, melihat dan berbicara, normal anggota tubuh, mampu berpikir, berani dan dari suku Quraisy. Jadi, Al-Mawardi tidak menyebutkan bahwa pemimpin harus seorang laki-laki, dengan demikian ia membolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin (Al-Mawardi Imam, 2014, hlm. 9). Dalam Al-Qur`an banyak dibahas mengenai pemimpin dan ditemukan dalam berbagai ayat dari beragam topik dan tema, Contohnya dalam Qur`an surah Al-Anbiya (21) : 72-73, Dimana Ayat tersebut sebagai gambaran bahwa Al-Qu`ran mengisahkan para Nabi (Ishak dan Yakub) sebagai pemimpin bagi umatnya masing-masing. Begitu pun dengan nabi Muhammad saw, sebagai Nabi dan Rasul sekaligus posisinya sebagai pimpinan politik (Herlambang, 2018, hlm. 4-5).

Isu keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan masih menjadi perdebatan menarik. Ulama seperti Abdurrauf As-Singkili dalam tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* tidak secara eksplisit membolehkan perempuan menjadi pemimpin, dipengaruhi oleh konteks sosial saat hak-hak perempuan sering terabaikan (Razali dkk., 2021). Dilema muncul antara pandangan tradisional yang memprioritaskan peran domestik perempuan dan realitas modern di mana banyak perempuan berkarier di berbagai bidang. Perdebatan ini juga dipengaruhi oleh interpretasi ayat Al-Qur'an seperti An-Nisa' ayat 34, yang sering digunakan untuk membenarkan superioritas laki-laki dalam kepemimpinan (Muhammad & Perempuan, 2001, hlm. 23).

Namun, sejarah Islam juga mencatat peran penting perempuan dalam kepemimpinan dan perjuangan, seperti Khadijah yang menyumbangkan hartanya untuk perjuangan Islam dan Ratu Balqis yang digambarkan bijaksana dalam Al-Qur'an surah an-Naml ayat 23 (Anaedi dkk., 2012, hlm. 64). Meskipun terdapat hadits yang secara tekstual melarang kepemimpinan perempuan (HR. Bukhari no. 4425), ada juga tokoh yang membolehkan, merujuk pada kepemimpinan Aisyah dalam perang Jamal dan kemampuan Ratu Balqis. Perbedaan pandangan ini menunjukkan kompleksitas isu kepemimpinan perempuan dalam Islam, yang terus diperdebatkan hingga kini (Farida, 2019).

Beberapa karya yang membahas isu kepemimpinan perempuan meliputi disertasi Muhammad Amin (2021) yang membandingkan pandangan Abdurrauf As-Singkili dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, menyoroti kontroversi dalam kepemimpinan perempuan di Aceh, di mana sebagian ulama membolehkan dan sebagian lain tidak, meskipun mayoritas ulama klasik dan kontemporer tidak melarangnya karena kesetaraan kelebihan dan kekurangan antara laki-laki dan perempuan. Tesis Farida (2019) juga mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an terkait kepemimpinan perempuan, menyoroti keterlibatan historis perempuan seperti Khadijah dan Ratu Balqis. Artikel jurnal oleh Razali, Mansur, Hanif, & Al-Fairusy (2021) membahas penafsiran Abdurrauf As-Singkili tentang kepemimpinan perempuan, sementara artikel Desi Purnama Sari (2016) meneliti persepsi ulama tentang keterlibatan perempuan dalam politik di Aceh Selatan. Halimah Basri (2018) membahas

pandangan mufassir tentang kepemimpinan politik perempuan, mencatat bahwa mayoritas mufassir kontemporer tidak melarangnya, berdasarkan Q.S. At-Taubah/9:17 dan contoh historis seperti Ratu Balqis dan keterlibatan Aisyah dalam politik. Penelitian-penelitian ini memberikan landasan untuk memahami kompleksitas isu kepemimpinan perempuan dari berbagai perspektif.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dengan terjun langsung ke tokoh-tokoh dayah di Woyla untuk menggali informasi tentang analisis ayat-ayat kepemimpinan perempuan perspektif ulama dayah. Metode kualitatif diterapkan dengan menekankan pada penyimpulan induktif dan analisis dinamika hubungan antar fenomena. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan data penelitian terkait analisis ayat-ayat kepemimpinan perempuan.

Lokasi penelitian meliputi Yayasan Pesantren Miftahul Jannah, Pondok Pesantren Nahrul Ulum Diniyah Islamiah, dan Pondok Pesantren Raudhatul Muarif di Woyla. Pemilihan lokasi didasarkan pada kesesuaian dengan penelitian tentang ulama Dayah dan keunikan masing-masing pesantren. Data yang dikumpulkan meliputi data primer mengenai analisis ayat-ayat kepemimpinan perempuan dan data sekunder berupa informasi dari informan. Sumber data meliputi kepala dayah, guru-guru, tenaga kependidikan, serta dokumentasi seperti surat-surat, buku pedoman, dan gambaran umum tentang dayah.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dengan pertanyaan terperinci dan bebas terpimpin untuk memperoleh informasi dari informan. Teknik pengolahan data meliputi pencatatan, reduksi, pengelompokan, identifikasi, dan penggunaan data yang valid dan relevan. Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data (*data display*) dalam bentuk naratif, bagan, dan kesimpulan (*conclusion drawing*) serta verifikasi data.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil

Dari hasil penelitian terhadap beberapa tokoh agama (Tgk) di Woyla, pandangan mengenai kepemimpinan perempuan terbagi menjadi dua kubu.

Tgk Muhammad Nasir Al-Khairi (MNA) dari Dayah Miftahul Jannah, seorang tokoh agama yang dikenal di masyarakat Woyla, berpendapat bahwa pemimpin ideal harus mencintai agama dan memiliki kemampuan yang lengkap. Menurutnya, kemampuan ini kurang dimiliki oleh perempuan. Ia meyakini bahwa hakikat seorang pemimpin adalah pelayan bagi yang dipimpinnya, dengan tujuan kemaslahatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pemimpin harus dipilih dengan benar agar dapat menyelamatkan baik dunia maupun akhirat.

MNA merujuk pada QS. An-Nisa ayat 34 sebagai dasar bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Ia menganggap kisah Ratu Balqis (QS. An-Naml ayat 23) tidak relevan karena terjadi sebelum masa Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak dapat dijadikan contoh bagi kebolehan perempuan menjadi pemimpin di era sekarang. Meskipun demikian, ia menekankan pentingnya mematuhi pemimpin perempuan selama tidak melanggar syariat Islam.

Senada dengan MNA, Tgk Umar Wira Hadi Kesuma (UWHK) dari Dayah Miftahul Jannah juga berpandangan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin karena martabatnya adalah untuk dipimpin, bukan memimpin. Ia juga menganggap kepemimpinan Ratu Balqis tidak diakui karena pada akhirnya tunduk pada perintah Nabi Sulaiman. Pandangan ini juga diperkuat dengan

QS. An-Nisa ayat 34. UWHK menyoroti permasalahan kepemimpinan di zaman sekarang yang jauh dari keadilan, di mana hukum seringkali lebih berat bagi kalangan bawah daripada kalangan atas.

Tgk Safriadi dari Dayah Nahrul Ulum Diniah Islamiah (NUDI) juga berpegang pada QS. An-Nisa ayat 34 dan menganggap kisah Ratu Balqis tidak dapat dijadikan patokan hukum. Ia menekankan pentingnya memilih pemimpin yang tepat, layaknya memilih makanan yang tidak membahayakan kesehatan. Ia melihat kesalahan dalam memilih pemimpin telah banyak terjadi dan mengakibatkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.

Berbeda dengan pandangan mayoritas, Tgk Auriza dari Dayah Nahrul Ulum Diniah Islamiah (NUDI) berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin selama mampu dan memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin. Ia menafsirkan QS. An-Nisa ayat 34 sebagai pembahasan mengenai hubungan suami istri, bukan larangan kepemimpinan perempuan secara umum.

Tgk Auriza merujuk pada QS. At-Taubah ayat 71 sebagai ayat yang menormalisasi tanggung jawab yang sama antara laki-laki dan perempuan, di mana mereka sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menjadi penolong bagi yang lainnya. Ia juga melihat kisah Ratu Balqis dalam QS. An-Naml ayat 23 sebagai bukti kemampuan perempuan dalam memimpin.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di antara tokoh agama di Woyla mengenai kepemimpinan perempuan. Sebagian besar berpegang pada interpretasi tradisional QS. An-Nisa ayat 34 dan menganggap kisah Ratu Balqis tidak relevan, sementara sebagian kecil berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin selama memenuhi kriteria dan mampu mengemban tanggung jawab.

Perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas isu kepemimpinan perempuan dalam Islam, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti interpretasi teks agama, tradisi, dan konteks sosial budaya.

## 2. Pembahasan

### a. **Pandangan ulama dayah Woyla terhadap kepemimpinan serta kepemimpinan perempuan**

Dari hasil penelitian yang didapat dari para informan peneliti menemukan beberapa pandangan terkait kepemimpinan dan kepemimpinan Perempuan, sebagaimana terlihat bahwa sekarang kualitas pemimpin sudah sangat jauh dari yang diharapkan dan anggapan-anggapan yang menyebabkan kualitas seorang Perempuan terpinggirkan, hal ini bisa disebabkan karena beberapa faktor, yakni : faktor internal, Dimana masih banyak Perempuan yang tidak memanfaatkan potensi yang terdapat dalam dirinya sendiri dengan tidak mengambil peluang-peluang yang ada untuk peningkatan kualitas diri, pengendalian diri, berkomunikasi, sehingga Perempuan berprestasi secara baik dalam posisi apapun, baik itu istri, ibu dan tokoh Masyarakat, dan faktor eksternal, yang datangnya dari luar diri seorang Perempuan, misalnya dominasi akan laki-laki untuk tetap dijadikan sebagai leader yang kemudian ini berubah menjadi produk budaya, sehingga hal ini merugikan terhadap Perempuan (Hartono, 2021, hlm. 85-87).

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti di lapangan dari berbagai informan, maka hasil penelitian menemukan adanya indikasi keberpihakan terhadap gender, Dimana mereka menjelaskan secara ego bahwa laki-laki yang lebih diutamakan Allah dalam hal apapun, maka dengan demikian laki-laki dianggap lebih sempurna, dan tuntutan dari seorang pemimpin adalah kesempurnaan maka dengan demikian mereka hanya melihat realitas kepemimpinan hanya berada pada diri seorang laki-laki.

Menurut pandangan peneliti masalah kepemimpinan ini memang suatu permasalahan yang cukup fenomenal yang menghasilkan pro dan kontra di setiap ruang lingkup Masyarakat baik itu kalangan ulama, dan Masyarakat biasa. Selain itu, peneliti memandang banyak kalangan Masyarakat dizaman sekarang ini yang sudah tidak menaruh kepercayaan terhadap pemimpin, hal tersebut dikarenakan Sebagian oknum kalangan pemimpin yang melakukan kecurangan-kecurangan serta perbuatan semena-mena terhadap Masyarakat biasa. Oleh karena itu peneliti menganggap pemimpin ini dimulai dengan memilih siapa yang hendak dijadikan sebagai pemimpin, dizaman ini realita yang terlihat adalah banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan yang tentunya ini sesuai dengan dampak yang terjadi sekarang ini, misalnya calon pemimpin melakukan suap menyuap Ketika pemilihan umum dan mirisnya banyak sekali Masyarakat yang mengiyakan hal tersebut hanya dikarenakan bayaran yang tidak seberapa. Tanpa mereka sadari hal tersebut akan berdampak sangat besar dikemudian hari, terlihat sekali pemahaman agama yang sudah sangat di kesampingkan hanya dikarenakan bayaran yang tidak seberapa. Dengan demikian, tidak heran dizaman sekarang banyak yang menyalahkan kekuasaan hanya demi kepentingan penguasa yang salah dan itu juga disebabkan kesalahan Masyarakat yang salah memilih pemimpin.

#### **b. Pandangan ulama dayah Woyla terhadap ayat Al-Qur`an yang menjelaskan tentang kepemimpinan Perempuan**

Mengenai kepemimpinan Perempuan yang masih menjadi pro dan kontra kalangan ulama sampai dengan sekarang. Disini ulama dayah woyla memiliki pandangannya tersendiri tentang kepemimpinan Perempuan dapat dilihat bahwa pandangan ataupun pemikiran ulama dayah woyla khususnya cenderung sama dengan anggapan para ulama klasik ataupun kontekstual, Dimana Mayoritas ulama menganggap bahwa setelah memahami hadis secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengannya dilarang. Sedangkan Menurut syara', perempuan hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga suaminya. Di samping itu, terdapat juga beberapa dalil mereka gunakan sebagai anggapan itu sebagai dalil yang melarang perempuan menjadi pemimpin di luar rumah tangganya, yaitu: pertama, QS. al-Nisâ` [4]: 34. Kedua, hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan perempuan kurang cerdas dibanding laki-laki. Ketiga, hadis "*lan yufliha qawm wallau amrahum imra'ah.*" Ketiga dalil tersebut saling terkait dalam memperkuat argumentasi ketidakbolehan perempuan memegang kepemimpinan. Dengan alasan lain, baik ayat maupun hadis tersebut mengisyaratkan kepemimpinan hanya untuk laki-laki, dan menegaskan keharusan perempuan mengakui kepemimpinan ini.

Terkait ayat tentang kepemimpinan Perempuan yakni dalam QS. An-Naml : 23. Semuanya membenarkan bahwa ayat tersebut mengisahkan tentang contoh kepemimpinan yang dipegang oleh seorang Perempuan yakni ratu balqis, namun mereka berbeda pendapat tentang maksud adanya ayat tersebut, ada yang mengatakan bahwa ayat tersebut hanya untuk dikisahkan karena hal tersebut terjadi sebelum masa kerasulan nabi Muhammad saw. maka tidak dapat untuk dijadikan dalil hukum bahwa Perempuan boleh menjadi pemimpin, sisi yang lain mengatakan ayat tersebut dikisahkan dalam al-qur`an, maknanya hal tersebut dapat dijadikan suatu pedoman bagi kehidupan manusia, dikarenakan al-qur`an memang tuntunan dalam kehidupan manusia, Dimana didalamnya memuat kebenaran yang tidak ada satu manusiapu yang boleh ragu akannya. Hal ini disampaikan oleh mereka yang tidak melarang kepemimpinan Perempuan. Realita yang ada Perempuan dapat berkiprah di luar selama ia mampu.

Dengan melihat realita yang terjadi dizaman sekarang ini, Persoalan menjadi pemimpin bukan hanya permasalahan laki-laki ataupun Perempuan melainkan seseorang yang dinilai mampu, dapat dipercaya, Amanah, dan juga paham agama, mengingat kenyataan yang terjadi dizaman sekarang

banyak dikalangan pemimpin laki-laki yang tidak sesuai dengan fungsinya, bukan untuk memudahkan Masyarakat tapi mereka malah menyusahkan dan bahkan semena-mena terhadap kalangan Masyarakat terutama Masyarakat biasa yang dianggap kelas rendah. Jadi, dengan demikian dapat dilihat bahwa laki-laki bisa melakukan kesalahan yang menunjukkan laki-laki sama dengan Perempuan yaitu sama-sama makhluk ciptaan Allah, yang membedakan hanya gender dan level ketakwaan terhadap Allah. Oleh karena itu peneliti menganggap Perempuan bisa saja menjadi seorang pemimpin jika ia memiliki kemampuan dan dipercaya oleh Masyarakat hal ini juga sejalan dengan pendapat kalangan ulama kontemporer yang membolehkan seorang Perempuan menjadi pemimpin.

### **c. Analisis Pengaruh Adat Aceh dan Budaya Patriarki**

#### **1) Budaya Patriarki dan Interpretasi Teks Al-Qur'an**

Budaya patriarki yang mengakar kuat di Aceh sangat memengaruhi cara ulama dan masyarakat menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an terkait kepemimpinan perempuan. Penafsiran klasik yang berkembang di lingkungan pesantren dan masyarakat Aceh cenderung tekstual dan dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak superior dan perempuan sebagai pihak inferior. Hal ini terlihat dari kecenderungan ulama untuk menggunakan QS. An-Nisa ayat 34 sebagai dalil utama penolakan kepemimpinan perempuan, dengan pemaknaan bahwa laki-laki adalah pemimpin mutlak bagi perempuan (Erviena, 2021; Kamil & Suriadi, 2021). Budaya patriarki ini juga melahirkan stereotip bahwa perempuan tidak layak atau tidak mampu memegang kekuasaan, sehingga peran perempuan dibatasi pada ranah domestik dan sosial tertentu saja (Erviena, 2021).

#### **2. Adat Aceh dan Peran Ulama**

Adat Aceh yang sangat lekat dengan nilai-nilai Islam juga memperkuat pengaruh ulama dalam membentuk opini masyarakat terkait kepemimpinan perempuan. Ulama di Aceh memiliki otoritas tinggi dan pendapat mereka sangat menentukan arah pemikiran masyarakat, termasuk dalam hal memilih pemimpin perempuan (Azmi Ramadhan, 2018). Dalam konteks Pilkada Banda Aceh misalnya, perbedaan pendapat antar ulama sangat berpengaruh pada sikap masyarakat terhadap calon perempuan (Azmi Ramadhan, 2018). Adat yang memuliakan laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan komunitas semakin memperkuat interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan kepemimpinan laki-laki.

#### **3. Dualisme Pandangan: Tradisi dan Sejarah Aceh**

Menariknya, meskipun budaya patriarki sangat kuat, sejarah Aceh juga mencatat adanya sultanah atau ratu yang pernah memimpin Kesultanan Aceh Darussalam pada masa lalu (2021). Hal ini menunjukkan bahwa secara historis, perempuan pernah diberi ruang untuk memimpin, meski dalam praktik keagamaan kontemporer ruang tersebut semakin menyempit akibat pengaruh tafsir-tafsir yang dipengaruhi budaya patriarki. Sebagian ulama, seperti Abdurrauf As-Singkili, bahkan pernah membolehkan perempuan menjadi pemimpin selama memenuhi syarat keagamaan dan keadilan (Razali dkk., 2021).

#### **4. Reduksi Makna Ayat dan Implikasi Sosial**

Budaya patriarki juga menyebabkan terjadinya reduksi makna terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Misalnya, kata *qawwam* dalam QS. An-Nisa' 34 yang bermakna luas (penanggung jawab, pelindung, pemimpin) seringkali dipersempit hanya pada makna kepemimpinan mutlak laki-laki atas perempuan, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan kebahasaan yang lebih luas (Erviena,

2021). Akibatnya, perempuan tidak hanya dibatasi dalam kepemimpinan publik, tetapi juga dalam peran-peran sosial lain seperti menjadi imam shalat atau menikahkan perempuan lain.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan ulama Dayah Woyla terhadap kepemimpinan perempuan sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki dan adat Aceh yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin utama. Meskipun ada ruang interpretasi yang lebih terbuka, khususnya dalam konteks muamalah atau sejarah Aceh, dominasi budaya patriarki tetap menjadi faktor utama yang membatasi peran perempuan dalam kepemimpinan, baik dalam tafsir ayat-ayat Al-Qur'an maupun dalam praktik sosial sehari-hari.

## B. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pandangan ulama Dayah Woyla terhadap kepemimpinan, khususnya kepemimpinan perempuan, masih sangat dipengaruhi oleh interpretasi tradisional terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan budaya patriarki yang kuat di Aceh. Mayoritas ulama menegaskan bahwa kepemimpinan adalah bagian penting dalam kehidupan manusia dan harus dijalankan oleh individu yang memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Namun, dalam hal kepemimpinan perempuan, sebagian besar ulama berpandangan bahwa perempuan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin, dengan merujuk pada QS. An-Nisa ayat 34 yang menegaskan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan. Mereka juga menilai bahwa kodrat perempuan adalah untuk dipimpin, bukan memimpin, dan hanya sebagian kecil yang membuka ruang bagi perempuan untuk memimpin di luar ranah rumah tangga, serta menyoroti kisah Ratu Balqis sebagai pengecualian yang tidak dapat dijadikan dalil hukum secara umum.

Terdapat pula perbedaan penafsiran terkait ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas kepemimpinan perempuan, di mana sebagian ulama menilai kisah Ratu Balqis hanya sebagai cerita sejarah, sementara sebagian lain melihatnya sebagai bukti kemampuan perempuan dalam memimpin. Faktor budaya lokal dan patriarki sangat memengaruhi tafsir ini, sehingga perempuan seringkali diposisikan secara subordinat dalam struktur sosial dan keagamaan.

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, dominasi budaya patriarki dan interpretasi tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an telah membatasi ruang gerak perempuan dalam kepemimpinan, baik di ranah publik maupun domestik. Hal ini berkontribusi pada minimnya representasi perempuan dalam posisi strategis di masyarakat Aceh, termasuk dalam pemerintahan dan lembaga keagamaan. Kedua, terdapat potensi kehilangan kontribusi positif dari perempuan yang sebenarnya mampu dan layak menjadi pemimpin, karena adanya hambatan budaya dan tafsir agama yang konservatif.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perlunya pembaruan pemahaman keagamaan yang lebih kontekstual dan inklusif, agar perempuan dapat diberikan kesempatan yang sama dalam berperan di masyarakat. Jika tidak ada perubahan paradigma, maka diskriminasi berbasis gender akan terus berlangsung dan menghambat kemajuan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh.

Berdasarkan temuan penelitian ini, sangat penting bagi para ulama dan tokoh agama untuk melakukan kajian ulang terhadap tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan inklusif. Ulama diharapkan dapat membuka ruang diskusi yang lebih moderat, mengedepankan contoh peran perempuan dalam sejarah Islam sebagai dasar untuk memberikan peluang kepemimpinan bagi perempuan di masa kini. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan edukasi yang memadai mengenai pentingnya kesetaraan gender dan potensi perempuan dalam kepemimpinan, sehingga budaya patriarki yang membatasi peran perempuan perlahan dapat dikikis melalui dialog terbuka dan penguatan kesadaran lintas generasi.

Pemerintah dan lembaga pendidikan juga memiliki peran strategis dalam mendorong pemberdayaan perempuan melalui program pelatihan kepemimpinan dan kebijakan afirmatif yang meningkatkan partisipasi perempuan dalam posisi strategis. Kolaborasi antara ulama, akademisi, dan aktivis perempuan sangat diperlukan untuk memperkuat argumentasi keagamaan yang mendukung kepemimpinan perempuan sekaligus mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan setara. Selain itu, penelitian lanjutan juga dianjurkan untuk menggali lebih dalam faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi pandangan ulama serta dampak nyata keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan di Aceh, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan solusi yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi. (2015). *Al-Ahkam Al-Sulthaniah*. (K. Fath, & Fathurrahman, Penerj.) Jakarta: Qisthi Press.
- Amin, M. (2022). *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Mufassir Aceh: Studi Komparatif Tafsir Terjemahan Al-Mustafid Karya Abdurrauf As-Singkily Dengan Tafsir An-Nur Karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*. Jakarta: Institut PTIQ Jakarta. Diambil kembali dari <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/668/>
- Ash-Shalabi, M. A. (2012). *Sejarah Lengkap Rasulullah saw: Fiqh dan Studi Analisa Komprehensif*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Basri, H. (2018). Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Ketatanegaraan*, 7(1), 51-66. doi:10.24252/ad.v7i1.5313
- Depdiknas, D. P. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (3th ed.). Jakarta: Balai Pustaka.
- Echols, J. M., & Shadily, H. (2003). *An English-Indonesian Dictionary*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Farida, F. (2019). *Kepemimpinan Wanita Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir)*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. Diambil kembali dari <https://repository.radenintan.ac.id/5494/>
- Habibi, D. M. (2017). *Penafsiran Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 51*. Yogyakarta.
- Hartono, R. (2021). Kepemimpinan Perempuan Era Globalisasi. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)*, 1(1), 82-99.
- Herlambang, S. (2018). *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an*. Pontianak : Ayunindya.
- Kayo, R. K. (2005). *Kepemimpinan Islam dan Dakwah*. Jakarta: Amzah.
- Khaldun, I. (1998). *Tarikh Ibn Khaldun*. Beirut : Dar al-Fikr.
- Muhammad, H. (2002). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
- Purnamasari, D. (2016). *Persepsi Ulama Tentang Keterlibatan Perempuan Dalam Bidang Politik di Aceh Selatan*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Diambil kembali dari <https://repository.radenintan.ac.id/5494/>
- Quthub, S. (1995). *Fi Zhilal al-Qur'an*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Razali, M., Mansur, M., Hanif, & Al-Fairusy, M. (2021). Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Pandangan Abdur Rauf As-Singkily. *BASHA'IR: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(2), 85-94. doi:10.47498/bashair.v1i2.867
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. VIII). Jakarta: Lentera Hati.
- Umar, N. (2001). *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.